

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan” dilatar belakangi oleh ditetapkannya standar kompetensi kerja nasional indonesia pada pengawas kerja syariah. Hasil penelitian skripsi ini untuk menjawab bagaimana urgensi sertifikasi dewan pengawas syariah dalam perbankan syariah perspektif perlindungan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang mana bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan sertifikasi DPS kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena penulis menganalisa berdasarkan pasal dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Teknis analisa menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa urgensi sertifikasi pada dewan pengawas syariah sangat penting melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi DPS dilapangan, serta pemilihan anggota DPS yang tidak memperhatikan kompetensi dan keahlian. Hal ini akan mempengaruhi kinerja DPS dalam Perbankan Syariah yang berakibat pada terjebaknya konsumen dalam hal ini adalah nasabah pada akad-akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari pemikiran para tokoh, penelitian-penelitian jurnal serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah ada menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi DPS menjadi penting, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap anggota DPS di Lembaga Keuangan Syariah terutama Perbankan Syariah harusnya diwajibkan untuk bersertifikasi.

Kata Kunci : Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan Syariah

ABSTRACT

This thesis entitled "Urgency of Sharia Supervisory Board Certification (DPS) in Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking Perspective of Regulation of the Financial Services Authority No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection of the financial services sector "on the basis of the stipulation of the Indonesian national working competence standards on the supervisors of sharia work. The result of this thesis research is to answer how urgency certification of syariah supervisory board in sharia banking perspective of consumer protection.

The method used in this study is a qualitative method for the type of library research (library research), which is descriptive analysis by describing the results of research related to DPS certification and then analyze it based on consumer protection law. The approach used is the approach of legislation because the authors analyze based on the article in Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Technical analysis using descriptive method with data collection through documentation.

The results of this study which the urgency of certification on the Sharia supervisory board is very important to see the problems faced by DPS field, as well as the election of members of DPS who do not pay attention to competence and skill. This will affect the performance of DPS in Sharia Banking which resulted in the trapping of consumers in this case is the customer on the contracts which are not in accordance with the principles of sharia. From the thinking of the figures, the research journals and the existing laws and regulations indicate that the urgency of DPS certification is important, it can be deduced that every member of DPS in Sharia Financial Institution especially Sharia Banking should be required to be certified.

Keywords: *Sharia Supervisory Board Certification, Consumer Protection and Sharia Banking Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5

D. Tinjauan Pustaka	6
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	11
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	13
C. Pedoman Umum Kerja Dewan Pengawas Syariah	16
D. Prosedur Penetapan Dewan Pengawas Syariah	19
E. Landasan Hukum Dewan Pengawas Syariah	22
F. Problematika dan Kelemahan Dewan Pengawas Syariah	24
G. Pengertian Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah	26
1. Pengertian Sertifikasi	26
2. Pengertian Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah	26
H. Pengertian Perlindungan Konsumen	31
I. Macam-macam Konsumen	34
J. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen	35
1. Landasan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	37
2. Landasan Hukum Positif Perlindungan Konsumen	39
K. Ketentuan Prinsip-prinsip Syariah	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Pendekatan Penelitian	48

D. Sumber Data	49
1. Sumber Data Primer	49
2. Sumber Data Sekunder	50
3. Sumber Data Tersier	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pemberian Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.....	54
B. Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.....	61
1. Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah.....	63
2. Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dalam Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	69
3. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXXVIII

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 : Tabel Paket Kompetensi Setifikasi DPS	29
Tabel. 2 : Tabel Sumber Data Penelitian	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 : Prosedur sertifikasi Dewan Pengawas Syariah	64
Gambar .2 : Urgensi Dewan Pengawas Syariah Perspektif Syariah	67
Gambar .3 : Urgensi Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perspektif Perlindungan Konsumen	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Lampiran 2 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 25 tahun 2007 tentang Penetapan Standar Kerja Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklarifikasi ditempat lain (YTLD) PADA Jabatan Pengawas Kerja Syariah.
- Lampiran 3 : 1. Formulir Permohonan Sertifikasi (Form APL 01)
2. Formulir Asesmen Mandiri (Form APL 02)
3. Formulir Persetujuan Asesmen dan Kerahasiaan (MAK 03)

DAFTAR SINGKATAN

BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BMT	: Baitul māl Wat-Tamwīl
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
LSP	: Lembaga Sertifikasi Profesi
LSP P2	: Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke-2
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
UUPS	: Undang-Undang Perbankan Syariah
UUS	: Unit Usaha Syariah
VATM	: Valid, Asli, Terkini, dan Memadahi